

## STANDAR UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MENGUNAKAN NILAI RAPOR MERUPAKAN KEMAJUAN ATAU KEMUNDURAN?<sup>1</sup>

Oleh :

**Abdul Wahid**

### PENDAHULUAN

Visi pendidikan kritis didasarkan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks, kultural, ekonomi dan politik yang lebih luas.<sup>2</sup> Pandangan atau visi ini memberi pemahaman bahwa setiap produk, kebijakan dalam dunia pendidikan akan membawa konsekuensi dan implikasi yang luas dalam struktur masyarakatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa "institusi pendidikan tidaklah netral, independen dan bebas dari berbagai kepentingan, namun justru menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang pertarungan kepentingan".<sup>3</sup> Menurut Tilaar, pendidikan bukanlah suatu lembaga yang netral, namun merupakan pelaksana dari sistem kekuasaan yang ada di masyarakat.<sup>4</sup>

Apa yang hendak dibangun melalui pendidikan dan pemikiran kritis ini adalah kesetaraan, daya kritis dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, agar harkat dan martabatnya dapat meningkat, serta dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari pendidikan tersebut. Pendidikan kritis ini kiranya dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengurai bahkan idealnya mengantisipasi budaya postrelitas sekarang ini, sehingga bisa menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu dialog "penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil".<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan pada Forum Diskusi Dosen Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, pada tanggal 10 Januari 2014.

<sup>2</sup> M. Agus Nuryanto, *Madzhab Pendidikan Kritis; Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Riset Book, 2008), hlm. 1-2.

<sup>33</sup> Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan; Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis Sosialis, Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 483.

<sup>4</sup> H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 115.

<sup>5</sup> Mansour Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2011), hlm. 33.

Masyarakat dan dunia pendidikan saat ini sedang ramai membicarakan rencana kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) mengenai penghapusan jalur tulis dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2013. Penghapusan ujian tulis ini akan diganti dengan SNMPTN undangan serta ujian mandiri yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi negeri masing-masing. Salah satu tujuan penghapusan ujian tulis ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta untuk meningkatkan fungsi dari ujian nasional (UN) yang selama ini menjadi penentu kelulusan peserta didik dalam menentukan kelanjutan studinya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (10/9/2012), mengatakan, integrasi hasil ujian nasional SMA/MA/SMK harus mulai diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tahun 2013. PTN diminta mempertimbangkan hasil UN siswa dalam menyeleksi mahasiswa baru sehingga pelaksanaan UN tidak mubazir. "Hasil UN harus terintegrasi di semua jenjang. Jika dari SD ke SMP ke SMA bisa pakai hasil UN, kenapa di PT tidak boleh? Jika alasannya hasil UN tidak bisa dipercaya, pelaksanaan UN terus- menerus dilakukan dan melibatkan perguruan tinggi," kata Nuh.

Sementara Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi saat ditanya soal integrasi hasil UN pada penerimaan mahasiswa baru di PTN tahun 2013, mengatakan, hasil UN, yang juga salah satu penentu kelulusan siswa di jenjang pendidikan menengah, dipertimbangkan dalam penerimaan lewat jalur undangan. "Nanti akan ada pembobotan. Berapa persentase dari nilai rapor dan nilai UN masih akan dibahas bersama," ujar Idrus. Pada tahun 2013, sebanyak 90 persen penerimaan mahasiswa baru PTN secara nasional lewat jalur undangan. Penyeleksian mahasiswa baru dengan mempertimbangkan nilai rapor di kelas 1-3 dan hasil UN. Selama ini, pengakuan hasil UN dalam seleksi nasional masuk PTN, baik lewat jalur undangan maupun tulis, dengan cara mahasiswa baru yang diterima harus lulus UN.<sup>6</sup>

Saat ini wacana yang beredar di masyarakat mengenai paket ujian nasional akan ditambah, pada tahun 2011/2012 paket ujian nasional sebanyak 5 paket tetapi

---

<sup>6</sup> Sumber <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/10/>,

pada tahun 2013 mendatang akan ditambah menjadi 20 paket. Hal ini jelas akan menambah beban peserta didik, baik dari segi psikologisnya maupun mentalnya. Tetapi tujuan pemerintah dengan penambahan paket ini yaitu untuk menekan angka kecurangan yang marak terjadi dalam praktik penyelenggaraan UN di Indonesia, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan ditambahkan paket untuk ujian nasional tersebut diharapkan peserta didik akan lebih giat serta akan lebih termotivasi dalam belajar. Hasil ujian nasional ini juga nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

### **SKEMA SNMPTN**

Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) secara nasional mulai tahun 2013 diutamakan lewat jalur undangan. Sebanyak 90 persen kursi di PTN diperebutkan lewat seleksi nasional jalur undangan yang terbuka bagi semua siswa kelas 3 di jenjang pendidikan menengah. “Untuk tahun depan, penerimaan mahasiswa baru yang seleksi nasional mencapai 90 persen. Kuota itu ditujukan untuk siswa yang berada di kelas tiga SMA/SMK atau sederajat pada tahun 2013. Adapun siswa yang lulus tahun lalu bisa ikut lewat ujian tulis yang jatahnya 10 persen,” kata Idrus Paturusi, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, Senin (10/9/2012).

Menurut Idrus yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, pada awalnya penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) hendak diubah seluruhnya lewat jalur undangan saja. Penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan nilai raport selama belajar di pendidikan menengah dan nilai ujian nasional (UN). “Namun, ada masukan supaya tetap ada kesempatan bagi lulusan tahun lalu yang mau ikut ujian lagi. Mereka bisa lewat ujian tulis yang diselenggarakan tiap PTN,” ujar Idrus.

Dengan berubahnya sebagian besar penerimaan mahasiswa baru PTN lewat jalur undangan, pendaftaran menjadi terbuka buat semua siswa kelas 3 di jenjang pendidikan menengah. Sebelumnya, seleksi nasional lewat jalur undangan dikhususkan bagi siswa berprestasi yang direkomendasikan tiap sekolah, yang jumlahnya bergantung pada akreditasi sekolah.

Selain pendaftaran terbuka bagi semua siswa, biaya pendaftaran pun ditanggung pemerintah. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal itu disebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN dapat lewat pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan bentuk lain. Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan beban masyarakat untuk pendaftaran ujian masuk PTN selama ini cukup tinggi. Selain itu, di tingkat akhir siswa SMA/SMK juga menjadi stress karena dibebani UN dan berbagai tes masuk ke PT. “Pemerintah memikirkan supaya ada satu cara penerimaan yang bisa berlaku untuk semuanya. Biaya pendaftaran yang ditanggung masyarakat akan ditanggung pemerintah,” kata Nuh.

## **BEBERAPA JALUR SNMPTN**

### **A. Jalur Ujian Tertulis SNMPTN**

Jalur tulis SNMPTN adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan mengandalkan hasil ujian tersebut. Ujian tulis SNMPTN ini digunakan untuk menyeleksi siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri di seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan waktunya telah terjadwal. Biasanya ujian tulis SNMPTN ini dilakukan setelah ujian nasional telah diselenggarakan dan sebelum pengumuman ujian kelulusan.

### **B. Jalur Ujian Non Tertulis SNMPTN**

Dalam wacana yang telah beredar di masyarakat mengenai penghapusan ujian tulis SNMPTN, kemungkinan peluang masuk perguruan tinggi negeri hanya akan dilalui dengan dua jalur yaitu:

## 1. Jalur SNMPTN Undangan

Jalur SNMPTN undangan adalah seleksi masuk perguruan tinggi dengan mengandalkan prestasi akademik yang tercantum dalam rapor siswa. Dengan hasil jenjang SMA nantinya bisa dijadikan tiket untuk mendaftar di setiap perguruan tinggi negeri (PTN). Sehingga semua siswa memiliki kesempatan mendaftar di setiap perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Kebijakan ini dilakukan untuk memperluas kesempatan keterwakilan siswa lokal, memperbesar angka partisipasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mengurangi beban siswa yang baru lulus SMA, untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap sekolah, serta untuk meningkatkan fungsi Ujian nasional (UN) dan integrasinya dengan perguruan tinggi.

Adapun kuota untuk jalur undangan memiliki komposisi sebesar 60%, yang akan dibagi dalam dua bentuk yaitu, undangan tanpa ujian tulis (diperuntukkan bagi siswa yang lulus tahun 2013) dan undangan dengan ujian tulis (untuk mengakomodasi siswa lulusan tahun sebelumnya).

Dalam wacana yang beredar di masyarakat, pola jalur undangan ini akan ditentukan berdasarkan nilai rapor serta hasil Ujian Nasional (UN). Dalam proses ini, kriteria sekolah juga turut mempengaruhi jumlah siswa yang berhak menerima jalur undangan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan agar penentuan penerima jalur undangan dapat dilaksanakan dengan adil, yaitu:

- a) Mengevaluasi kembali nilai rapor berdasarkan kriteria sekolah
- b) Mengubah norma atau aturan ujian nasional (UN)
- c) Memberikan akses lebih kepada siswa yang memiliki bakat khusus.

Dari wacana, Pembagian kuota jalur undangan SNMPTN ini juga disesuaikan berdasarkan tingkat akreditasi sekolah, yaitu :

- a) Sekolah dengan akreditasi A kuotanya mencapai 50%
- b) Sekolah dengan akreditasi B kuotanya mencapai 30%

c) Sekolah dengan akreditasi C kuotanya mencapai 15%

d) Sedangkan untuk sekolah yang tidak terakreditasi kuotanya sebesar 5%

Dalam wacana yang beredar, SNMPTN jalur undangan ini juga perlu memprioritaskan siswa didaerah terpencil yang umumnya miskin tetapi memiliki potensi akademik sebab, mereka mendapatkan layanan pendidikan yang belum baik, sehingga perlu keberpihakan pemerintah.

## 2. Jalur Mandiri

Jalur mandiri merupakan ujian masuk yang diselenggarakan oleh setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bersangkutan secara mandiri serta sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi negeri tersebut. Biasanya jalur ini menetapkan biaya yang sangat mahal kepada calon mahasiswa baru. Komposisi untuk jalur mandiri yaitu sebesar 40 %.

Dalam wacananya, biaya pendidikan dengan jalur mandiri tetap, tidak ada kenaikan sebab kebutuhan pendidikan akan dipenuhi melalui BO PTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri). Ketua panitia SNMPTN 2012 Akhmaloka mengungkapkan bahwa semua rektor yang masih membuka jalur mandiri sudah sepakat untuk menurunkan biaya pendidikan karena kemendikbud menjanjikan adanya BO PTN, dan persentase penurunannya tergantung kebijakan masing-masing rektor perguruan tinggi negeri tersebut.

Berdasarkan data, beberapa PTN yang membuka jalur mandiri ialah Universitas Negeri Makassar (UNM) yang membuka 1.437 kursi untuk Strata satu (S-1) dan diploma tiga (D-3). Universitas Negeri Medan (Unimed) menyediakan 2.000 kursi. Universitas Padjadjaran (Unpad) 2.504 kursi. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyediakan 2.337 kursi dan di Universitas Sumatera Utara (USU) tersedia 1.772 kursi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sumber <http://chemistryed.wordpress.com/2012/11/23/penghapusan-ujian-tulis-seleksi-nasional-masuk-perguruan-tinggi-negeri-snmptn-tahun-2013/> diunduh tgl. 1 April 2013

## WACANA PRO DAN KONTRA: SEBUAH KAJIAN KRITIS

Di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang, hendaknya menciptakan suatu strategi yang sama baiknya walaupun masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Di negara-negara maju, sistem pendidikan selalu –atau hampir selalu- menjurus ke dua sasaran, *pertama* adalah bidang prateknologi, sedangkan *kedua* adalah perbaikan dan penyegaran golongan elite-pimpinan (dalam hal pendidikan tinggi). Sistem pendidikan seperti itu –dengan sifat-sifat khususnya- biasanya dilaksanakan juga di negara-negara berkembang dengan beberapa kekurangannya, di antaranya, tidak disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan atau keadaan lingkungan sosial penduduknya.<sup>8</sup>

Pendidikan –khususnya pendidikan tinggi- dipandang dapat menjadi solusi cerdas dan cepat bagi perbaikan dan kemajuan bangsa. Kehadirannya harus dapat menjadi “ruh” bagi dinamika masyarakatnya. Namun demikian, dewasa ini pendidikan seolah kehilangan ruhnya. Darmaningtyas menyatakan keprihatinannya, bahwa sekolah telah mengadopsi mekanisme pasar. Sekolah telah berubah menjadi “pasar swalayan” sehingga tidak ada lagi hubungan yang bersifat personal dan *human* antar individu di dalamnya. Yang tersisa tinggal pola hubungan yang transaksional dan fungsional.<sup>9</sup> Inilah setidaknya persoalan besar, bahwa idealisme pendidikan telah pudar. Pendidikan telah menjadi industri yang sarat dengan praktik-praktik transaksional, bahkan tak jarang menghalalkan segala cara. Bagaimana praktik kecurangan, mulai seleksi/rekruitmen siswa, guru, kepala sekolah, kepala dinas dan seterusnya kerap terjadi. Semuanya akan menjadi bom waktu bagi keruntuhan peradaban bangsa, jika tidak segera disadari.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menggulirkan wacana untuk meniadakan seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur ujian tertulis. Ke depan, hanya ada dua sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN). *Pertama*, SNMPTN jalur undangan yang didasarkan pada nilai rapor, ranking siswa, dan nilai Ujian Nasional (UN). *Kedua*, seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN.

<sup>8</sup> Sindhunata, (Ed.) *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Jakarta: Kanisius, 2001), hlm. 8.

<sup>9</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-rusakan*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 254.

Perubahan sistem ini tentu mengundang berbagai perbedaan pendapat. Pengamat pendidikan dari Perguruan Kanisius Romo Baskoro mengatakan nilai rapor atau angka tidak bisa menjadi jaminan seseorang untuk diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia menyayangkan bagaimana mungkin PTN bisa menerima seseorang menjadi mahasiswanya hanya berdasarkan angka yang didapat dari standar penilaian sekolah yang berbeda beda. "Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan angka karena standar penilaian setiap sekolah tidak sama," kata Romo Baskoro. Menurutnya, ketidakadilan muncul dari sistem penerimaan mahasiswa yang seperti ini karena ada sekolah yang terbilang ketat dalam memberikan nilai. Tetapi ada juga sekolah yang mudah/murah memberikan nilai. Sekolah-sekolah bermutu, lanjutnya, biasanya tidak mudah memberikan nilai tinggi. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang tidak terlalu bermutu cenderung mudah memberikan nilai tinggi.

Hal itu akan terlihat pada hasil ujian nasional dan ujian sekolah. Nilai ujian nasional pada siswa sekolah bermutu biasanya akan lebih tinggi ketimbang nilai ujian sekolah. Sedangkan pada siswa sekolah yang kurang bermutu hal yang terjadi adalah sebaliknya.

Romo Baskoro berpendapat pemerintah tidak mau dibuat repot dengan mengadakan jalur undangan dan meniadakan jalur ujian tertulis. Ujian tertulis, jelasnya, membutuhkan banyak pekerjaan seperti membuat soal, mengoreksi jawaban dan mengawasi ujian. Sedangkan dengan sistem pengisian data siswa secara online, PTN hanya tinggal menyaring berdasarkan kriteria nilai yang diinginkan tanpa mengetahui dari mana angka yang didapatkan.

"Ujian tertulis menjamin keadilan sosial semua peserta asal semua pihak yang menjalankan serius mengerjakannya dan tidak melanggar aturan," tegasnya. Pemerintah harus berpikir ulang dengan keputusannya yang meniadakan jalur ujian tertulis. Tidak dibutuhkan evaluasi karena sistem penerimaan mahasiswa di PTN tidak selayaknya dijadikan ajang percobaan sistem yang berganti ganti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sumber : <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/03/3/128266/Dipertanyakan-Seleksi-Masuk-PTN-Berdasarkan-Nilai-Rapor-> diunduh tgl. 2 April 2013

Sebelum memberlakukan sistem seleksi baru ini, diperlukan evaluasi terhadap sistem seleksi yang ada dan diinformasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan baru akan didukung oleh bukti-bukti kuat guna menumbuhkan tradisi transparansi dalam pengambilan kebijakan.

Ada tiga hal penting yang perlu dikaji sebelum mengubah sistem penerimaan.

1. *Aspek Validitas Prediktif (Predictive Validity).*

Salah satu aspek validitas yang dikaji dalam penggunaan indikator kuantitatif untuk seleksi mahasiswa ke perguruan tinggi adalah validitas prediktif, yaitu kemampuan indikator tersebut dalam memprediksi keberhasilan mahasiswa di perguruan tinggi. Apakah UN maupun seleksi mandiri oleh masing-masing PTN memiliki validitas prediktif minimal setara SNMPTN tulis? SNMPTN jalur undangan yang digunakan sejak tahun lalu tampaknya cukup memberi harapan meskipun terdapat variasi nilai rapor antarsekolah dan kemungkinan manipulasi nilai rapor. Ranking siswa dan konsistensi ranking yang tinggi membantu mengeliminasi dampak variasi tersebut. Selain itu, panitia SNMPTN jalur undangan juga telah menentukan persentase siswa yang dapat mengikuti jalur undangan berdasarkan akreditasi sekolah (Akreditasi A: 50 persen terbaik, B: 30 persen terbaik, C: 15 persen terbaik, lainnya: 5 persen terbaik). Di mana nilai siswa harus konsisten di semester III, IV, dan V. Pemeringkatan dilakukan sesuai dengan jurusan IPA, IPS, atau Bahasa berdasarkan nilai mata pelajaran yang diujikan dalam UN. PTN pun dapat menilai kredibilitas tiap sekolah berdasarkan berbagai indikator prestasi akademik dan non-akademik siswa juga dapat membantu untuk menilai calon mahasiswa. Pertanyaannya, apakah menambahkan nilai UN sebagai kriteria seleksi ke PTN dapat meningkatkan validitas prediktif oleh nilai rapor dan ranking siswa?

2. *Dampak Perubahan Sistem Terhadap Komposisi Mahasiswa di PTN*

Aspek lain yang dalam menentukan sistem seleksi mahasiswa ke PTN adalah kaitannya dengan komposisi mahasiswa. Peluang lebih besar ada pada calon mahasiswa yang berasal dari kalangan lebih mampu secara ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya *multiple advantageous* yang dimiliki siswa

berkondisi sosial ekonomi lebih baik dan multiple disadvantaged yang dimiliki siswa dengan kondisi sosial ekonomi kurang baik. Dengan kondisi yang demikian, kenapa pula dalam penerimaan mahasiswa baru dicantumkan penghasilan orangtua siswa?

Kajian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem seleksi mahasiswa baru tidak lebih menguntungkan calon mahasiswa dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sistem tersebut harus mampu memberikan peluang yang setara bagi calon mahasiswa dari berbagai lapisan masyarakat. Ini karena keragaman komposisi mahasiswa di perguruan tinggi akan memberikan pengalaman yang lebih kaya dan berharga bagi para mahasiswa. Harapan untuk menjaring calon mahasiswa yang unggul selayaknya diparalelkan dengan upaya untuk menjamin akses yang setara bagi calon mahasiswa dari berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini tampaknya tidak dapat disandarkan semata-mata pada sistem seleksi yang digunakan, tetapi juga pada upaya untuk mengurangi dampak sosial ekonomi terhadap pencapaian siswa sejak dini.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan sebuah perguruan tinggi.

### 3. *Transparansi Sistem Penilaian dan Publikasi*

Dirahasiakannya nilai seluruh peserta ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (baik undangan, tertulis maupun mandiri) akan menimbulkan adanya berbagai kecurangan, karena tidak adanya transparansi penilaian. Potensi adanya kecurangan sangat besar karena tertutupnya nilai peserta yang diterima maupun tidak diterima di PTN. Sistem seleksi ini bisa menyuburkan praktik jual beli kursi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Untuk menghindari kecurangan, seyogianya sistem penilaian dan hasil nilai

seluruh peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dibuka secara umum kepada publik. Apalagi penyelenggaraan SNMPTN yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau sistem penilaian dan hasil nilai diumumkan, peserta tidak bertanya-tanya lagi mengapa ada peserta yang diterima dan ada yang tidak diterima. Selama ini panitia SNMPTN tidak pernah mengumumkan nilai peserta seleksi, hanya nama dan jurusan yang dicantumkan. Dengan demikian, nilai dan alasan seseorang diterima atau tidak diterima hanya menjadi misteri.

Memang panitia SNMPTN bisa menggunakan beberapa cara untuk mengumumkan nilai tersebut. Pertama, dengan membuka hasil ujian secara terbuka di depan publik. Kedua, secara tertulis dan langsung diberikan kepada peserta. Ketiga, bisa dengan mengirim nilai ke rumah masing-masing peserta. Dari ketiga cara tersebut yang terbaik adalah cara yang pertama yaitu secara terbuka.

Menanggapi Ketua Panitia Pusat SNMPTN, Akhmaloka, yang menegaskan bahwa nilai hasil ujian tidak bisa dibuka terang-terangan. Bahkan, begitu rahasianya nilai tersebut, Akhmaloka mencetuskan bahwa tak ada pihak manapun yang berhak meminta agar hasil ujian tersebut dibuka. Karena itu, hingga saat ini panitia SNMPTN tak punya wacana untuk membuka nilai hasil peserta ujian.

Jika nilai hasil ujian tidak bisa dibuka terang-terangan, maka justru ini akan mencederai hak peserta ujian. Karena peserta ujian akan bertanya-tanya kenapa tidak diterima, apalagi jika terjadi peserta ujian lain yang notabene kepandaianya masih ada di bawahnya, justru diterima. Untuk menjawab kecurigaan masyarakat akan adanya kecurangan dalam ujian masuk PTN dan mengemban amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru yang memenuhi *prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi*. Maka ke depan, metode apapun yang akan diterapkan dalam seleksi masuk PTN, tetap

mengedepankan transparansi, baik sistem penilaian dan hasil penilaian peserta ujian.<sup>11</sup>

Jika pelaksanaan seleksi penerimaan siswa baru di tingkat SMP atau SMA dapat dilakukan dengan transparan dan tidak ada masalah, mengapa di Perguruan Tinggi tidak?

## **DAMPAK POSITIF**

Dampak positif dari penghapusan jalur ujian tulis SNMPTN, yaitu:

1. Akan memicu para siswa lebih dini mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan, yaitu dari kelas 1 SMA (atau kelas 10). Sebab, jalur undangan akan memperhatikan nilai rapor siswa selama sekolah. Jadi, kesuksesan itu dilihat dari prosesnya (prestasi belajar selama sekolah), bukan hanya dari hasil akhir saja (ujian tulis SNMPTN). Hal ini juga menjawab protes sebagian kalangan yang pernah mengkritik penentuan kelulusan siswa SMA hanya dari hasil UAN (Ujian Akhir Nasional) semata, sementara hasil belajar selama 3 tahun di sekolah diabaikan. Ibaratnya hasil UAN selama 3 hari dapat menghapus hasil belajar selama 3 tahun. Dengan SNMPTN jalur undangan yang porsinya besar (60%) maka jerih payah siswa 3 tahun diperhitungkan sebagai syarat diterima di PTN.
2. Dengan dihapusnya jalur tulis dan hanya membuka jalur undangan dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN, beban penyelenggaraan SNMPTN lebih ringan karena tidak perlu lagi mencetak naskah untuk ujian tulis. Bahkan, tanpa dipungut biaya apapun alias Gratis
3. Mengurangi beban siswa yang baru lulus SMA, karena tidak perlu lagi belajar untuk ujian SNMPTN.
4. Masing-masing sekolah akan berusaha untuk meningkatkan nilai/standar akreditasinya.

---

<sup>11</sup> Sumber <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/13/09060611/Soal.UN.2013>, diunduh tgl. 2 April 2013

## **DAMPAK NEGATIF**

Dampak negatif dari penghapusan jalur ujian tulis SNMPTN, yaitu:

1. Dapat memacu praktik baru untuk mendongkrak nilai rapor yang sudah ada agar peserta didik bisa masuk PTN, apalagi nanti saingannya akan lebih banyak lagi, sehingga kemungkinan besar akan membuka celah-celah terjadinya kecurangan, sehingga harus diperhatikan pemahaman karakter dalam pencapaian nilai anak secara jujur.
2. SNMPTN undangan akan didominasi oleh anak-anak yang hanya memiliki prestasi atau kecerdasan akademik, sementara anak-anak dengan kemampuan lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk diundang.

## **ANALISIS**

Menganalisis perubahan sistem seleksi masuk PTN melalui jalur SNMPTN dengan meniadakan tes tertulis ini, tentu memunculkan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengatakan apakah sistem ini baik atau tidak. Yang jelas, hal ini merupakan sebuah upaya inovasi dalam pendidikan. Sebelum diluncurkan, tentu pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan serangkaian kajian mendalam serta memperhatikan opini publik. Sejauh belum dilaksanakan tentu akan susah untuk dapat menilai apakah produk inovasi ini berhasil atau tidak.

Bahwa sebuah kebijakan atau produk inovasi pendidikan (bahkan di bidang apapun) tentu akan mengundang reaksi pro maupun kontra, tergantung dari sudut pandang dan kepentingan masing-masing orang. Hukum ekonomi dan sosial akan mengatakan bahwa; sesuatu yang menguntungkan oleh satu pihak akan dikatakan baik, namun sebaliknya jika hal itu merugikan maka akan dikatakan tidak baik. Tentu perlu mempertimbangkan sekian banyak aspek secara komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan yang berdampak lebih luas bagi masyarakat dan bangsa.

Beberapa catatan analisis yang dapat ditarik dari wacana di atas antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan ini telah memiliki payung hukum, yaitu pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal itu disebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN dapat lewat pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan bentuk lain. Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Karena hal ini telah menjadi ketetapan Undang-undang, maka harus dijalankan sejauh tidak/belum ada amandemen atau putusan yang membatalkannya.
2. Cara ini merupakan upaya untuk membangun sebuah sistem pendidikan nasional, dalam hal ini seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, secara lebih efektif, efisien, terpadu, transparan dan akuntabel.
3. Cara ini merupakan upaya untuk meningkatkan bobot kualitas dan penghargaan terhadap nilai raport dan UN di tingkat sekolah menengah, agar dapat diintegrasikan sebagai pertimbangan dalam seleksi penerimaan calon mahasiswa baru.
4. Secara ekonomi, dengan model ini akan dapat menekan *high-cost* dalam “tradisi” pendaftaran calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.
5. Secara manajemen, tentu akan dapat dikurangi secara drastis dan signifikan, rangkaian kegiatan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, yang biasanya membutuhkan banyak perhatian, waktu serta tenaga.
6. Pengintegrasian UN dengan seleksi masuk PTN selama ini masih pro-kontra. Sebab, UN untuk mengukur prestasi siswa di sekolah, sedangkan seleksi PTN memprediksi potensi akademik dan keberhasilan calon mahasiswa selama kuliah.
7. Sejauh praktik-praktik kecurangan belum dapat dieliminasi, maka gagasan dan tujuan besar ini tidak akan terwujud. Evaluasi atau penilaian sejak anak duduk di bangku sekolah menengah harus betul-betul dilakukan secara fair, adil, akuntabel dan benar-benar menunjukkan kompetensi siswa yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Nuryanto, *Madzhab Pendidikan Kritis; Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Riset Book, 2008).

Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-rusakan*, (Yogyakarta: LkiS, 2005).

H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Mansour Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2011).

Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan; Tradisional, (Neo) Liberal, Marrxis Sosialis, Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

Sindhunata, (Ed.) *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Jakarta: Kanisius, 2001).

<http://chemistryed.wordpress.com/2012/11/23/penghapusan-ujian-tulis-seleksi-nasional-masuk-perguruan-tinggi-negeri-snmptn-tahun-2013/>

<http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/10/>,

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/03/3/128266/Dipertanyakan-Seleksi-Masuk-PTN-Berdasarkan-Nilai-Rapor->